

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Agama merupakan kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab di bidang agama. Salah satunya adalah Kantor Kementerian Agama kota Bekasi. Bhinneka Tunggal Ika dan harmoni dalam keberagaman adalah kata kunci yang tidak bisa diganggu gugat. Saling menghormati antar pemeluk agama adalah cara terbaik dalam rangka melahirkan kehidupan beragama yang harmonis.(Alpizar, 2015). Bangunan-bangunan dalam pembangunan ini mencerminkan keyakinan agama masyarakat. Hal ini menciptakan rasa persatuan dalam masyarakat, meskipun keyakinan yang berbeda dari penduduknya.

Seni adalah bagian dari simbol dalam kehidupan, dan dapat digunakan untuk mengekspresikan sentimen keagamaan dalam konteks hubungan manusia dengan bangunan. (Harun, 2009):16; (Tinker, 2004):442). Keberadaan minoritas agama non-Muslim dipahami sebagian untuk menghindari kesalahpahaman yang berpihak pada satu kaum, sedangkan menciptakan keagungan merupakan bagian dari agama. Oleh karena itu, meminimalkan perbedaan dalam kesalahan persepsi menjadi penting untuk menghindari munculnya perseteruan.(Rakhmat, 2013). Interior sebuah kantor kementerian agama dapat memiliki dampak yang signifikan pada emosi dan perilaku orang-orang yang mengunjunginya. Ini juga bisa menjadi katalisator untuk pengalaman keagamaan.(Gavril, 2012). Memang, ini dapat dipertimbangkan oleh desainer sebagai sumber kemungkinan dan solusi untuk kreativitas desain arsitektur serta interior. Memahami pembentukan makna dan pengembangan pengalaman perseptual merupakan dasar dari semua pengetahuan (Ponty, 2010). Teori ini didasarkan pada konsep teologis tentang realitas alam semesta hubungannya dengan manusia. Teori ini memiliki dampak besar pada bagaimana orang berpikir tentang ruang dan tempat di dunia.

Teori tersebut dapat diimplementasikan dalam bangunan publik yang memberikan suatu tempat untuk urusan keagamaan yaitu Kementerian Agama kota Bekasi yang juga salah satu merupakan sarana adanya kepedulian pemerintah daerah. Hal ini tentu didasarkan pada kesadaran akan pentingnya pelayanan bagi umat beragama. Ini beralasan bahwa Kementerian Agama merupakan rumah semua agama yang

menjunjung tinggi kerukunan di tengah masyarakat yang heterogen. Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi ini terdapat 5 lantai yang memiliki beberapa fasilitas penunjang untuk karyawan yang diantaranya lahan parkir kendaraan pribadi, kantin, ruang rapat, auditorium, *pantry*, *lobby*, ruang kerja, mushola dan area bermain anak. Kantor ini juga memiliki berbagai pelayanan agama yang terdiri dari agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Budha dan juga memberikan pelayan Haji, Umrah, Zakat serta pendidikan. Permasalahan yang terkait pada bangunan Perkantoran Kementerian Agama Kota Bekasi merupakan suatu kelemahan seperti interior kantor kurang mewakili identitas serta penempatan fungsi ruang yang sesuai dengan pelayanan setiap lantai masih kurang terorganisir.

Hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, atau antara satu kelompok kegiatan dengan kegiatan lainnya, tersusun dalam satu organisasi ruang atau penataan ruang. Setiap formasi interior selalu diawali dengan aktivitas manusia yang menjadi pendorong lahirnya wadah aktivitas. Di dalamnya terdapat pembentukan simbol-simbol ekspresif yang sesuai dengan perkembangan budaya, namun tidak menyimpang dari aturan agama. Peran Kantor Kementerian Agama untuk mewujudkan rasa kebersamaan, persatuan dan keharmonisan menjadikan bangunan ini seharusnya mampu mewujudkan keterbukaan untuk menampung semua orang. Interior Kementerian Agama berfungsi sebagai wadah harmonisasi, melalui simbolis yang memberikan peristiwa toleransi secara terbuka seperti tata letak ruang pelayanan agama yang menggambarkan keharmonisan rukun beragama.

Dalam menunjang fasilitas Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi dengan baik, maka idealnya mengikuti standar yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 mengenai luas ruang kerja berdasarkan jabatan, standar luas bangunan dan luas ruang penunjang, *Human Dimension and Interior Space by Julius Panero* mengenai besaran sirkulasi ruang ideal, Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 mengenai fungsi akustik dan pencahayaan, Studi banding proyek yaitu Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, Kementerian Agama Kota Bandung serta Kementerian Kota Semarang. Hasil studi banding yang telah dilakukan terhadap 3 proyek Kantor Kementerian Agama mendapatkan kesimpulan bahwa Kantor Kementerian Agama kurang memberikan suatu identitas unsur kesetaraan dalam keagamaan pada fasilitas masyarakat yang dapat dipergunakan

untuk seluruh umat beragama.

Untuk itu perlu dilakukan *redesign* bertujuan dari perancangan proyek Kementerian Agama untuk memperbaiki fungsi ruang, memperkaya nilai estetika dan menciptakan ruang yang serasi, pembaruan pada organisasi ruang, sirkulasi ruang yang mencakup pada fungsi ruang, penambahan element untuk menguatkan identitas bangunan dan pemaksimalan pada fasilitas yang sesuai dengan standar.

Selain tujuan dari perancangan, bangunan perkantoran Kementerian Agama memiliki tujuan untuk pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas serta peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijabarkan pada identifikasi masalah, maka identifikasi masalah dari perancangan interior adalah sebagai berikut:

a. Organisasi Ruang dan Layout

- **Kapasitas Ruang**

Kebutuhan luas ruang belum mencukupi luasan untuk kebutuhan area kerja sehingga berpengaruh pada kapasitas jumlah pengguna ruang.

- **Layout Eksisting**

Tata ruang zoning dan blocking yang kurang efektif. Seperti pada lantai 3, ruang keuangan, ruang kepegawaian, ruang perencanaan dan ruang umum masih bersatu dengan zoning publik sehingga kurang ideal dalam pengorganisasian antar ruang privat dengan fasilitas publik.

- **Hubungan Antar Ruang**

Penempatan fungsi ruang yang sesuai dengan pelayanan setiap lantai masih kurang terorganisir. Seperti pada ruang pembinaan Syariah berada di lantai 2, sedangkan Pembinaan Kristen, Pembinaan Katolik, Pembina Hindu dan Budha berada di lantai 3.

b. Persyaratan Umum Ruang

- **Variasi Furniture**

Kurangnya variasi penggunaan furniture membuat fungsi fasilitas menjadi terbatas. Seperti pada ruang rapat dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kurang memaksimalkan jenis furniture seperti *built-in* dan *loose*.

- **Ukuran Furniture**

Ukuran dan jenis furniture yang masih kurang sesuai dengan fungsi ruang. Seperti pada ruang pegawai dan arsip yang menggunakan berbagai macam furniture dengan ukuran yang melebihi kapasitas sirkulasi ruang. Sehingga berdampak pada efisiensi dan mobilitas pekerjaan seluruh pegawai.

- **Pencahayaan**

Permasalahan pencahayaan ada pada ruang arsip dan ruang kasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menggunakan *general lamp* namun pencahayaan kurang merata sehingga suasana ruang menjadi redup dan sempit.

- **Sign**

Tidak adanya petunjuk jalan menuju ruangan yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi. Petunjuk ruangan hanya di depan dan dalam Lift sehingga akan berdampak aksesibilitas pengguna ruang, salah satunya tamu dan pengunjung.

- **Akustik**

Kebisingan yang berasal dari koridor dan ruang tunggu berpotensi mengganggu ketenangan di ruang kerja maupun pelayanan. Namun pengkondisian ini diterapkan pada seluruh ruangan seperti pemakaian dinding panel khusus, penambahan karpet dan perancangan ceiling setiap ruang.

c. Konsep Visual

- **Konsep Bentuk**

Ruang yang masih datar, permainan visual hanya terjadi pada langit-langit. Kemudian, pengaplikasian dinding pada ruang Kasie masih monoton yang hanya berpolesan cat putih.

- **Konsep Warna**

Masih dominan putih sehingga tidak terlihatnya identitas bangunan yang dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi sehingga dapat berpengaruh pada suasana ruang yang dapat mencegah perasaan cemas dan tegang.

- **Konsep Ornamen**

Kurangnya ornamen yang menjadi suatu simbol kesetaraan semua agama.

- **Konsep Material**

Penggunaan material masih menggunakan kombinasi yang monoton sehingga dapat memberikan kesan jenuh kepada pengguna ruang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijabarkan pada identifikasi masalah, maka rumusan masalah dari perancangan interior adalah sebagai berikut masalah dari perancangan interior adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelompokan organisasi ruang dan layout yang ideal sesuai dengan kapasitas pengguna dan fungsi ruang?
- b. Bagaimana mengkombinasikan pemakaian furniture dalam interior ruang dan mengatur perancangan sarana sumber informasi sesuai dengan persyaratan umum?
- c. Bagaimana penerapan konsep visual dalam interior ruang yang dapat mendukung suasana unsur keagamaan sesuai dengan standarisasi dan pendekatan desain?

1.4 Tujuan dan Sasaran Perancangan

1.4.1 Tujuan

Perancangan interior Kementerian Agama kota Bekasi dengan pendekatan tema dan gaya yang terpusat dalam keagamaan diharapkan menjadi rumah bagi semua agama untuk meningkatkan kualitas nilai-nilai toleransi antar beragama. Komunikasi dalam konteks manusia dan alam terbentuk secara spasial dan berbagai desain, ide, selera, dan nilai terwujud dalam bentuk kantor Kementerian Agama pada saat yang sama kepercayaan yang tidak sesuai dengan penduduk sekitarnya menjadi selaras.

1.4.2 Sasaran

Sasaran dari perancangan Kementerian Agama kota Bekasi adalah seluruh masyarakat beragama yang ada di kota Bekasi agar mendapatkan fasilitas dan pelayanan keagamaan yang terbaik bagi seluruh umat.

1.5 Batasan Masalah

Batasan pada perancangan interior Kementerian Agama kota Bekasi adalah sebagai berikut :

- a. Objek desain terletak di Jl. A.Yani No.11, RT.004 RW.005, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17141.
- b. Total luas perancangan 2.268 m² dengan jumlah 3 lantai.
- c. Area Perancangan terdiri dari *lobby*, *counter*, PTSP, ruang arsip, kasie, area bermain anak, ruang humas, ruang TU, ruang sekretaris, ruang kerja dan istirahat kepala Kementerian Agama, ruang rapat, toilet, *pantry*, *nursery*, PAI, Pembina Kristen, ruang kerja Pokja, ruang keuangan, ruang kepegawaian, ruang perencanaan, ruang analis, dan ruang kerja umum.

1.6 Manfaat Perancangan

1.6.1 Manfaat Bagi Masyarakat / Komunitas

Menciptakan suatu keharmonisan manusia beriman di tengah kondisi masyarakat yang heterogen serta memberikan pengawasan moral bangsa dalam sistem kehidupan sosial dan pelayanan yang merata dalam bidang keagamaan.

1.6.2 Manfaat Bagi Institusi Penyelenggara Pendidikan

Membangun relasi keterlibatan langsung dalam membantu kepedulian dalam menciptakan pentingnya pelayanan bagi umat beragama dan meningkatkan kualitas pendidik dalam menerapkan ilmu yang telah didapat semasa perkuliahan.

1.6.3 Manfaat Bagi Keilmuan Interior

Menghadapi kesetaraan penciptaan sesuatu perancangan ditengah perbedaan yang mempunyai nilai lebih dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai.

1.7 Metode Perancangan

Metode perancangan yang digunakan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut :

1.7.1 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui Observasi dan studi lapangan pada area Kementerian Agama kota Bekasi. Disamping itu pengumpulan data sekunder juga dilakukan terkait dengan studi literatur seperti web resmi , jurnal dan buku yang berhubungan dengan topik perancangan.

1.7.1.1 Observasi

Hasil data yang diperoleh dengan observasi lapangan berupa kondisi site, lingkungan sekitar, budaya masyarakat, sistem alur aktivitas keseharian, karakter suasana ruang, dan beberapa fungsi ruang. Namun pada observasi lapangan memiliki kendala keterbatasan pengambilan data dalam bentuk foto dan dokumentasi karena satu dan lain hal yang telah ditetapkan pada peraturan Kementerian Agama kota Bekasi.

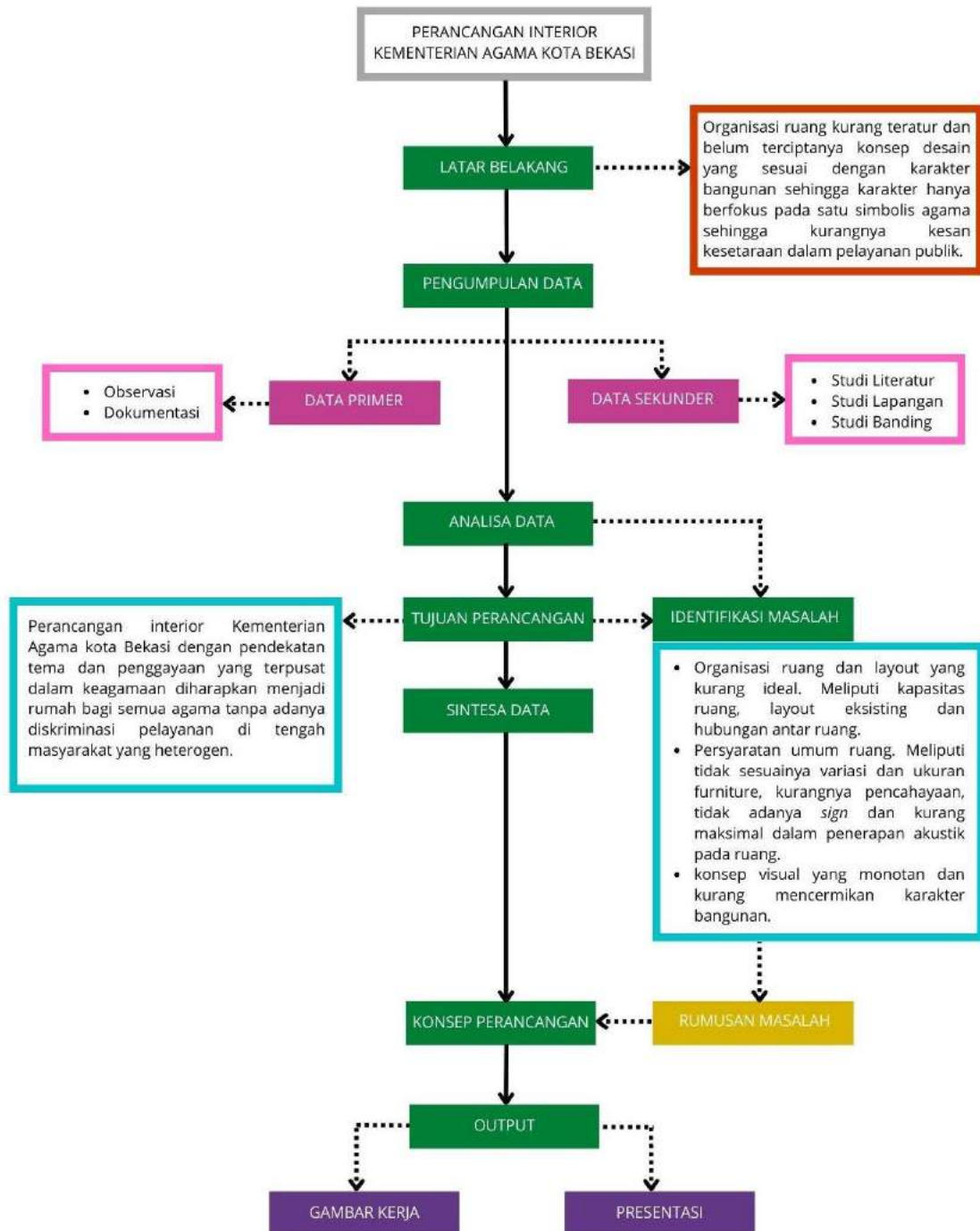
1.7.1.2 Wawancara

Melalui wawancara secara lisan kepada narasumber pengunjung dan pegawai dengan suatu format pertanyaan yang tersusun dan terencana. Data yang didapat diantaranya berupa persepsi pengguna bangunan dengan rinci.

1.7.1.3 Studi Literatur

Studi literatur yang didapatkan melalui situs web Kementerian Agama kota Bekasi yang memiliki data konkrit. Data yang didapat diantaranya berupa struktur organisasi, visi misi, dan aktivitas. Studi literatur juga diperoleh dari beberapa referensi pada jurnal tentang perancangan bangunan perkantoran, buku studi interior dan peraturan pemerintah sebagai landasan teori dalam standarisasi perancangan.

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada proposal ini berdasarkan lingkup pembahasan yang terkait dalam proses perancangan interior. Adapun sistematika penulisannya antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian-uraian latar belakang permasalahan dalam perancangan interior Kementerian Agama kota Bekasi. Dari penemuan permasalahan maka dilakukan identifikasi masalah, rumusan masalah serta batasan masalah yang merujuk pada pemanfaatan perancangan dengan metode yang telah ditentukan dan sistematika pembahasan yang dilakukan.

BAB II : KAJIAN LITERATUR DAN DATA PERANCANGAN

Bab ini berisi uraian-uraian yang berkaitan dengan teori literatur perancangan interior Kementerian Agama kota Bekasi serta analisa data lapangan yang sudah diolah.

BAB III : KONSEP PERANCANGAN DESAIN INTERIOR

Bab ini berisi uraian-uraian tema perancangan, konsep perancangan, organisasi ruang, layout, bentuk, material, warna, pencahayaan dan penghawaan, keamanan dan akustik seluruh fasilitas pada bangunan Kementerian Agama kota Bekasi.

BAB IV : KONSEP PERANCANGAN VISUAL DENAH KHUSUS

Bab ini berisi uraian-uraian mengenai pemilihan denah khusus, konsep tata ruang, persyaratan teknis ruang dan elemen interior.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi pada inti bagian akhir dari keseluruhan penulisan laporan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN